

BAB II

EVALUASI HASIL TRIWULAN I PELAKSANAAN RKPD PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2025

2.1. Evaluasi Pelaksanaan RKPD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 sampai dengan Triwulan I Tahun 2025

Dokumen Perubahan RKPD Tahun 2025 berperan sangat strategis bagi Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, karena merupakan penjabaran perubahan rencana strategis ke dalam rencana operasional untuk mengatasi tantangan pembangunan terkini. Dokumen Perubahan RKPD yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah menjadi landasan penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS untuk menyusun Perubahan APBD Tahun 2025.

Perubahan RKPD menjadi instrumen bagi pemerintah daerah untuk mengukur kinerja penyelenggaraan fungsi dan urusan wajib dan pilihan pemerintahan daerah dan instrumen untuk mengukur capaian target kinerja program pembangunan jangka menengah, dan kinerja pelayanan Perangkat Daerah di tahun berjalan agar selaras dengan apa yang direncanakan.

Hasil sangat tinggi dan tinggi menunjukkan pencapaian atau realisasi kinerja capaian telah memenuhi target, hasil sedang menunjukkan pencapaian atau realisasi kinerja capaian telah memenuhi persyaratan minimal, sedangkan hasil rendah dan sangat rendah menunjukkan pencapaian atau realisasi kinerja capaian belum memenuhi/masih di bawah persyaratan minimal pencapaian kinerja yang diharapkan.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025–2029 serta telah menyelaraskan dengan Asta Cita prioritas pembangunan nasional. Evaluasi ini bertujuan untuk menilai capaian kinerja pembangunan daerah hingga akhir Triwulan I Tahun 2025 dan mengidentifikasi berbagai kendala serta langkah strategis untuk triwulan selanjutnya.

Dalam rangkaian capaian makro daerah, Perekonomian Sumatera Selatan tahun 2024 tumbuh sebesar 5,03 persen, masih didominasi oleh Lapangan Usaha Pertambangan dan Penggalian sebesar 24,69 persen; diikuti oleh Industri Pengolahan sebesar 18,35 persen; dan Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sebesar 12,59 persen.

Pertumbuhan lapangan usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum tumbuh signifikan sebesar 9,39 persen; diikuti Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 9,35 persen; Informasi dan Komunikasi sebesar 8,84 persen; Pengadaan Listrik dan Gas sebesar 8,48 persen; dan Real Estate sebesar 8,17 persen. Industri Pengolahan; Pertambangan dan Penggalian dan Pertanian, Kehutanan dan Perikanan yang memiliki peran dominan tumbuh masing-masing sebesar 4,39 persen; 3,33 persen dan 2,59 persen.

Dari sisi pengeluaran, perekonomian Sumatera Selatan masih didominasi oleh Komponen PK-RT yang mencakup lebih dari separuh PDRB Sumatera Selatan yaitu sebesar 61,75 persen; diikuti oleh Komponen PMTB sebesar 31,01 persen; Komponen Ekspor Barang dan Jasa sebesar 24,26 persen; Komponen PK-P sebesar 6,17 persen dan Komponen PK-LNPRT sebesar 1,61 persen. Sementara itu, Komponen Impor Barang dan Jasa sebagai faktor pengurang dalam PDRB memiliki peran sebesar 24,80 persen.

Konsumsi rumah tangga tahun 2023 tumbuh sebesar 4,82 persen, didukung oleh subkomponen konsumsi transportasi dan komunikasi serta restoran dan hotel karena faktor peningkatan aktivitas wisata dan tingginya mobilitas masyarakat. Selain itu, menjelang tahun pemilu 2024 konsumsi Lembaga Non-Profit yang melayani Rumah Tangga tahun 2023 tumbuh mencapai 9,83 persen. Tingginya aktivitas kampanye, distribusi logistic kebutuhan pemilu, dan sosialisasi pelaksanaan pemilu memengaruhi tingginya realisasi ini.

Perekonomian Provinsi Sumatra Selatan berdasarkan besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku triwulan II-2024 mencapai Rp165,13 triliun dan atas dasar harga konstan 2010 mencapai Rp 95,06 triliun. Struktur PDRB Sumatra Selatan menurut lapangan usaha atas dasar harga berlaku triwulan II-2024 masih didominasi oleh Lapangan Usaha Pertambangan dan Penggalian sebesar 24,14 persen; diikuti oleh Industri Pengolahan sebesar 18,07 persen; dan Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sebesar 14,02 persen. Peranan ketiga lapangan usaha tersebut dalam perekonomian Sumatra Selatan mencapai 56,23 persen.

Penetapan berbagai asumsi kerangka ekonomi makro Provinsi Sumatera Selatan ditujukan untuk memberikan suatu dorongan (stimulus) dan sekaligus peluang bagi para pelaku usaha untuk melakukan investasi baru dan mengembangkan usaha. Dengan

bertambahnya investasi dan meningkatnya skala usaha diharapkan mendorong perluasan lapangan kerja, peningkatan pendapatan masyarakat dan pengurangan kemiskinan.

Pendapatan perkapita Sumatera Selatan cenderung mengalami peningkatan. Pada tahun 2020 Pendapatan Perkapita Sumsel sebesar 53,84 juta rupiah per orang pertahun, tahun 2024 telah meningkat pada angka 75,13 juta rupiah per orang pertahun. Selama lima tahun ini mengalami peningkatan sebesar 21,29 juta rupiah per orang pertahun dengan peningkatan rata-rata pertahun sebesar 5,32 juta rupiah per orang pertahun. Walaupun mengalami peningkatan, tetapi PDRB Perkapita Sumatera Selatan masih berada di bawah PDRB Nasional.

Angka kemiskinan di Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2024 mencapai 10,97% dari total penduduk Provinsi Sumatera Selatan. Angka kemiskinan pada tahun 2023 ini mengalami penurunan dibandingkan dengan angka kemiskinan pada tahun 2023 yang sebesar 11,78%. Penurunan ini searah dengan kondisi yang terjadi secara nasional. Persoalan kemiskinan bukan hanya sekedar berapa jumlah dan persentase penduduk miskin. Dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat kedalaman dan keparahan darkemiskinan. Indeks kedalaman kemiskinan adalah ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan.

Garis kemiskinan merupakan suatu nilai pengeluaran minimum kebutuhan makanan dan bukan makanan yang harus dipenuhi agar tidak dikategorikan miskin. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan. Pada Maret 2024 terlihat sumbangan Garis Kemiskinan Makanan (GKM) terhadap Garis Kemiskinan (GK) sebesar 74,57 persen sedangkan Garis Kemiskinan Bukan Makanan (GKBM) sebesar 25,43 persen.

Komoditi yang memberikan sumbangan terbesar pada GK pada umumnya hampir sama antara perkotaan dan perdesaan. Beras dan rokok kretek filter masih memberi sumbangan terbesar yakni 19,64 persen dan 10,26 persen di perkotaan. Di perdesaan, beras memberi sumbangan sebesar 25,38 persen dan rokok kretek filter 11,52 persen. Komoditi lainnya adalah daging ayam ras (5,07 persen di perkotaan dan 3,29 persen di perdesaan), telur ayam ras (4,42 persen di perkotaan dan

3,68 persen di perdesaan), mie instan (3,33 persen di perkotaan dan 2,43 persen di perdesaan), cabe merah (2,95 persen di perkotaan dan 2,28 persen di perdesaan), gula pasir (2,51 persen di perkotaan dan 2,88 persen di perdesaan) dan seterusnya.

Komoditi bukan makanan yang memberikan sumbangan terbesar baik pada GK perkotaan dan perdesaan adalah perumahan (8,10 persen di perkotaan dan 8,29 persen di perdesaan), bensin (3,87 persen di perkotaan dan 5,13 persen di perdesaan), listrik (3,58 persen di perkotaan dan 2,21 persen di perdesaan), pendidikan (1,99 persen di perkotaan dan 1,12 persen di perdesaan) dan lainnya.

Rasio Gini Provinsi Sumatera Selatan dari tahun 2024 cenderung lebih rendah yaitu sebesar 0,331 daripada tahun sebelumnya yang sebesar 0,338. Hal ini menunjukkan terjadinya penurunan ketimpangan pendapatan antar penduduk di Sumatera Selatan pada tahun 2024. Angka Gini Rasio Provinsi Sumatera Selatan dari tahun 2024-2024 capaiannya selalu lebih baik dari capaian Nasional karena angkanya selalu lebih kecil dibandingkan Gini Rasio Nasional.

Pembangunan Manusia yang diukur dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Sumatera Selatan terus mengalami kemajuan, pada tahun 2024 mengalami peningkatan menjadi 73,84 yang sebelumnya 71,62 pada tahun 2023. Hal ini tentunya merupakan keberhasilan bagi Provinsi Sumatera Selatan, tentunya tidak lepas dari angka capaian Kabupaten/Kota.

Jumlah penduduk yang menganggur sebanyak 179.710 orang (3,86%) pada Agustus 2024, terjadi penurunan pengangguran sebanyak 8.800 orang dibandingkan Agustus 2023 sebesar 188.510 orang (4,11%). Sebagian besar penduduk bekerja sebagai pekerja penuh yaitu 62,31% (2,79 juta orang), Sisanya 37,69% (1,69 juta orang) merupakan Pekerja Tidak Penuh. Tingkat Setengah pengangguran sebesar 9,83%, Pekerja paruh waktu di Sumsel sebesar 27,87%, artinya dari 100 orang penduduk yang bekerja terdapat sekitar 27-28 orang pekerja paruh waktu. Dibandingkan Agustus 2023, Tingkat Pekerja Paruh Waktu mengalami peningkatan sebesar 1,95 persen point. Untuk meningkatkan jumlah pekerja di bidang pekerjaan dengan keahlian menengah dan tinggi, pemerintah terus berupaya melakukan reformasi pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja.

Capaian makro Provinsi Sumatera Selatan seperti terlihat pada tabel 2.1 sebagai berikut :

Tabel 2.1
Capaian Indikator Makro Daerah RPD Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2024

No	Indikator	Satuan	Tahun 2024		Capaian Tahun 2024
			Target	Realisasi	
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	5,3-5,5	5,03	100
2	Pendapatan Per Kapita	Juta Rp/Kapita	73,33	75,13	110
3	Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif	%	6,39	6,31*	100
4	Indeks Entropi Theil	Indeks	2,090	2,331*	110
5	Nilai Tukar Petani	Nilai	109,56	124,18	110
6	Indeks Ekosistem Inovasi	Indeks	2,73	3,38	110
7	Tingkat Inflasi Daerah	%	2,5 +/- 1	1,20	100
8	Tingkat Kemiskinan	%	9,37 – 10,37	10,51	100
9	Gini Ratio	-	0,316 – 0,320	0,331	100
10	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	3,82 – 3,93	3,86	100
11	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	71,96	73,84	100
12	Indeks Pembangunan Gender	Indeks	94,47	93,25*	98,70
13	Indeks Pembangunan Pemuda	Indeks	72,5	54	74,48
14	Prevalensi Stunting	%	13,3	20,3	110
15	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	71,98	72,69	110
16	Persentase Penurunan Emisi GRK	%	8,04	20,20	42,87
17	Indeks Risiko Bencana Sumsel	Indeks	136,01	131,24	96,49
18	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	67,5 (B)	74,58 (BB)	110
19	Nilai SAKIP	Nilai	69,25 (B)	77,53	110
20	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	80,88 (A)	89,99 (A)	110

Ket:

* : data Tahun 2023

Pelaksanaan Pembangunan Perangkat Daerah triwulan I Tahun 2025 sebagai berikut :

Realisasi Pelaksanaan RKPD Provinsi Sumatera Selatan hingga Triwulan I Tahun 2025

Evaluasi hasil RKPD Tahun 2025 berdasarkan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan sampai dengan triwulan I Tahun 2025 sebagai berikut :

1. Dinas Pendidikan

- a) Realisasi belanja Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan sampai dengan Triwulan I Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp.436.299.326.038,- dengan realisasi kinerja sebesar 24,86%.
- b) Belum ditemukan hambatan yang berarti dan mempengaruhi sasaran dan prioritas pembangunan daerah Sumatera Selatan Tahun 2025.

2. Dinas Kesehatan

- a) Dinas Kesehatan sampai dengan Triwulan I Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp.45.245.532.380,- dan realisasi kinerja sebesar 12,95%.
- b) Tidak ada hambatan berarti dalam pelaksanaan program di Dinas Kesehatan, biarpun terjadi pergeseran kegiatan, perubahan alokasi dana atau kelompok sasaran, dan penghapusan kegiatan namun tidak mengganggu kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan.

3. Rumah Sakit Ernaldi Bahar

- a) Realisasi Belanja RS Ernaldi Bahar Provinsi Sumatera Selatan sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 sebesar Rp.8.987.694.701,- dengan realisasi fisik sebesar 22,21%.
- b) Belum ada kendala yang dihadapi yang berpengaruh pada sasaran dan prioritas pembangunan daerah Sumatera Selatan Tahun 2025.

4. RSUD Siti Fatimah

- a) Realisasi Belanja RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 sebesar Rp.27.502.280.601,- dengan realisasi fisik sebesar 8,24%.
- b) Kendala yang dihadapi:
 - 1) Ada beberapa program kegiatan yang masih dalam proses pembayaran.
 - 2) Pelaksanaan kegiatan yang belum dilakukan.

- 3) Adanya kegiatan yang masih dalam proses kontrak, tender, dan klik.
- 4) Barang yang masih dalam proses pengiriman.

5. Rumah Sakit Khusus Mata Masyarakat

- a) Realisasi Belanja Rumah Sakit Khusus Mata Masyarakat Provinsi Sumatera Selatan sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 sebesar Rp.5.853.155.504,- dengan realisasi fisik sebesar 16,34%.
- b) Belum ada kendala yang dihadapi yang berpengaruh pada sasaran dan prioritas pembangunan daerah Sumatera Selatan Tahun 2025.

6. Rumah Sakit Khusus Gigi dan Mulut

- a) Realisasi Belanja Rumah Sakit Khusus Gigi dan Mulut Provinsi Sumatera Selatan sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 sebesar Rp.2.518.930.132,- dengan realisasi fisik sebesar 31,04%.
- b) Belum ada kendala yang dihadapi yang berpengaruh pada sasaran dan prioritas pembangunan daerah Sumatera Selatan Tahun 2025.

7. Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air

- a) Realisasi belanja Dinas Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air sampai dengan akhir Triwulan I Tahun 2025 adalah sebesar Rp.4.691.342.560,- dengan realisasi kinerja sebesar 4,29%.
- b) Belum ada kendala yang dihadapi yang berpengaruh pada sasaran dan prioritas pembangunan daerah Sumatera Selatan Tahun 2025

8. Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang

- a) Realisasi Belanja Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 adalah sebesar Rp.9.560.989.790,- dengan realisasi kinerja sebesar 1,50%.
- b) Belum ditemukan hambatan yang berarti dan mempengaruhi sasaran dan prioritas pembangunan daerah Sumatera Selatan Tahun 2025.

9. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

- a) Realisasi Keuangan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan sampai dengan Triwulan I Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp.4.468.576.464,- dengan realisasi kinerja sebesar 3,58%.

- b) Belum ditemukan hambatan yang berarti dan mempengaruhi sasaran dan prioritas pembangunan daerah Sumatera Selatan Tahun 2025.

10. Satuan Polisi Pamong Praja

- a) Realisasi Belanja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Selatan sampai dengan Triwulan I Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp.7.671.138.180,- dengan realisasi fisik sebesar 32,95%.
- b) Belum ditemukan hambatan yang berarti dan mempengaruhi sasaran dan prioritas pembangunan daerah Sumatera Selatan Tahun 2025.

11. Dinas Sosial

- a) Realisasi Belanja Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan sampai dengan Triwulan I Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp.5.368.831.240,- dengan realisasi 21,28%.
- b) Belum ditemukan hambatan yang berarti dan mempengaruhi sasaran dan prioritas pembangunan daerah Sumatera Selatan Tahun 2025.

12. Badan Penanggulangan Bencana Daerah

- a) Realisasi Belanja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Selatan sampai dengan Triwulan I Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp.2.781.784.610,- dengan realisasi kinerja sebesar 10,59%.
- b) Belum ditemukan hambatan yang berarti dan mempengaruhi sasaran dan prioritas pembangunan daerah Sumatera Selatan Tahun 2025.

13. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

- a) Realisasi Belanja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan sampai dengan Triwulan I Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp.5.769.718.939,- dengan realisasi kinerja sebesar 17,40%.
- b) Belum ditemukan hambatan yang berarti dan mempengaruhi sasaran dan prioritas pembangunan daerah Sumatera Selatan Tahun 2025 akan tetapi Sumber Daya Manusia khususnya pegawai yang memiliki kemampuan dan kompetensi sesuai bidang teknis yang ada di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi telah memasuki masa pensiun sedangkan kaderisasi sangat lambat.

14. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

- a) Realisasi Belanja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan sampai dengan Triwulan I Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp.1.924.167.512,- dan realisasi kinerja sebesar 15,04%.
- b) Permasalahan yang dihadapi antara lain :
 - 1) Kebijakan/Peraturan tentang proses Penatausahaan Keuangan yang berubah/berganti
 - 2) Kesiapan PPTK untuk melaksanakan kegiatan belum maksimal
 - 3) Adanya Dokumen DPA yang harus direvisi
 - 4) Adanya kegiatan mendadak yang tidak terjadwal seperti panggilan acara di kementerian, rapat/pelatihan di provinsi

15. Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan

- a) Realisasi Belanja Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Selatan sampai dengan Triwulan I Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp.3.350.288.805,- dengan realisasi kinerja sebesar 8,48%.
- b) Dalam melaksanakan program kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025, secara umum masih dalam proses persiapan administrasi baik fisik maupun keuangan.

16. Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan

- a) Realisasi Belanja Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan sampai dengan Triwulan I Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp.8.348.505.142,- dengan realisasi kinerja sebesar 20,64%.
- b) Terdapat Indikator Kinerja yang tidak dapat terlaksana yakni pada indikator persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan (Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang/KKPR). Hal ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, bahwa pelaksanaan KKPR harus dilaksanakan melalui sistem OSS, akan tetapi terdapat keterbatasan pada sistem OSS dalam penerbitan KKPR yang menjadi kewenangan Provinsi Sumatera Selatan sehingga sampai dengan saat ini kegiatan tersebut belum bisa dilaksanakan.

17. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

- a) Realisasi Belanja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Selatan sampai dengan Triwulan I Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp.714.540.553,- dengan realisasi kinerja sebesar 7,95%.
- b) Belum ditemukan hambatan yang berarti dan mempengaruhi sasaran dan prioritas pembangunan daerah Sumatera Selatan Tahun 2025.

18. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

- a) Realisasi Keuangan Total Belanja Dinas PMD Prov. Sumsel sampai dengan Triwulan I Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp.1.829.623.758,- dengan realisasi kinerja sebesar 7,78%.
- b) Belum ditemukan hambatan yang berarti dan mempengaruhi sasaran dan prioritas pembangunan daerah Sumatera Selatan Tahun 2025.

19. Dinas Perhubungan

- a) Realisasi belanja Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan sampai dengan Triwulan I Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp.6.100.580.408,- dengan realisasi kinerja sebesar 14,06%.
- b) Belum ditemukan hambatan yang berarti dan mempengaruhi sasaran dan prioritas pembangunan daerah Sumatera Selatan Tahun 2025.

20. Dinas Komunikasi dan Informatika

- a) Realisasi Belanja Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Sumsel sampai dengan Triwulan I Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp.5.001.761.689,- dengan realisasi kinerja sebesar 14,68%.
- b) Belum ditemukan hambatan yang berarti dan mempengaruhi sasaran dan prioritas pembangunan daerah Sumatera Selatan Tahun 2025.

21. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

- a) Realisasi Belanja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sumatera Selatan sampai dengan Triwulan I Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp.2.028.617.759,- dengan realisasi kinerja sebesar 10,99%.
- b) Belum ditemukan hambatan yang berarti dan mempengaruhi sasaran dan prioritas pembangunan daerah Sumatera Selatan Tahun 2025.

22. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

- a) Realisasi Total Belanja DPMPTSP Provinsi Sumatera Selatan sampai dengan Triwulan I Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp.767.105.186,- dengan realisasi kinerja sebesar 2,80%.
- b) Belum ditemukan hambatan yang berarti dan mempengaruhi sasaran dan prioritas pembangunan daerah Sumatera Selatan Tahun 2025.

23. Dinas Pemuda dan Olahraga

- a) Realisasi Belanja Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan sampai dengan Triwulan I Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp.4.352.026.106,- dengan realisasi kinerja sebesar 5,60%.
- b) Belum ditemukan hambatan yang berarti dan mempengaruhi sasaran dan prioritas pembangunan daerah Sumatera Selatan Tahun 2025.

24. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

- a) Realisasi Keuangan Total Belanja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan sampai dengan Triwulan I Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp.4.258.146.247,- dengan realisasi kinerja sebesar 9,34%.
- b) Belum ditemukan hambatan yang berarti dan mempengaruhi sasaran dan prioritas pembangunan daerah Sumatera Selatan Tahun 2025..

25. Dinas Perpustakaan

- a) Realisasi Keuangan Total Belanja Dinas Perpustakaan Provinsi Sumatera Selatan sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 sebesar Rp.3.106.547.920,- dengan realisasi kinerja sebesar 14,27%.
- b) Belum ditemukan hambatan yang berarti dan mempengaruhi sasaran dan prioritas pembangunan daerah Sumatera Selatan Tahun 2025.

26. Dinas Kearsipan

- a) Realisasi Keuangan Total Belanja Dinas Kearsipan Provinsi Sumatera Selatan sampai dengan Triwulan I Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp.1.817.128.883,- dengan realisasi kinerja sebesar 27,31%.
- b) Belum ditemukan hambatan yang berarti dan mempengaruhi sasaran dan prioritas pembangunan daerah Sumatera Selatan Tahun 2025.

27. Dinas Kelautan dan Perikanan

- a) Realisasi keuangan belanja dinas Kelautan dan Perikanan provinsi Sumatera Selatan pada Triwulan I Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp.3.455.818.700,- dengan realisasi kinerja sebesar 8,47%.
- b) Belum ditemukan hambatan yang berarti dan mempengaruhi sasaran dan prioritas pembangunan daerah Sumatera Selatan Tahun 2025.

28. Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura

- a) Realisasi Keuangan Total Belanja Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan sampai dengan Triwulan I Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp.16.503.082.233,- dengan realisasi kinerja sebesar 14,91%.
- b) Kendala yang dihadapi antara lain:
 - 1) Kegiatan masih dalam proses SPJ terutama Gaji dan Tunjangan ASN
 - 2) Kegiatan teknis lainnya masih dalam proses CPCL dan penentuan titik lokasi

29. Dinas Perkebunan

- a) Realisasi keuangan total belanja Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan sampai dengan Triwulan I Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp.670.177.829,- dengan realisasi kinerja sebesar 4,17%
- b) Belum ditemukan hambatan yang berarti dan mempengaruhi sasaran dan prioritas pembangunan daerah Sumatera Selatan Tahun 2025.

30. Dinas Kehutanan

- a) Realisasi Keuangan Total Belanja Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan sampai dengan Triwulan I Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp.11.060.808.402,- dengan realisasi kinerja sebesar 21,53%.
- b) Kendala yang dihadapi antara lain:
 - 1) Patroli kebakaran hutan belum dilakukan karena masih musim hujan
 - 2) Adanya efisiensi anggaran.

31. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

- a) Realisasi Keuangan Total Belanja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Selatan sampai dengan Triwulan I

Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp.4.136.344.191,- dengan realisasi kinerja sebesar 19,11%.

- b) Kendala yang dihadapi antara lain:
 - 1) Beberapa kegiatan mengalami pemangkasan anggaran dikarenakan adanya efisiensi anggaran
 - 2) Terjadi perubahan rencana aliran kas akibat dari penyesuaian anggaran kegiatan

32. Dinas Perdagangan

- a) Realisasi Keuangan Total Belanja Dinas Perdagangan Provinsi Sumatera Selatan Triwulan I Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp.2.620.339.334,- dengan realisasi kinerja sebesar 27,01%.
- b) Kendala yang dihadapi dalam melaksanakan tugas pokok dalam pembinaan dan pengembangan sektor Perdagangan di Provinsi Sumatera Selatan adalah sebagai berikut:
 - 1) Pengembangan sektor Perdagangan masih kurang didukung data yang akurat dan tersedia belum tertata dengan baik
 - 2) Pelaksanaan program/kegiatan masih belum berjalan sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan.

33. Dinas Perindustrian

- a) Realisasi Keuangan Total Belanja Dinas Perindustrian Provinsi Sumatera Selatan Triwulan I Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp.1.676.856.056,- dengan realisasi kinerja sebesar 9,78%.
- b) Belum ditemukan hambatan yang berarti dan mempengaruhi sasaran dan prioritas pembangunan daerah Sumatera Selatan Tahun 2025.

34. Sekretariat Daerah

a. Biro Administrasi Pembangunan Setda

Realisasi Keuangan Total Belanja Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Sumatera Selatan Triwulan I Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp.111.246.332,- dengan realisasi kinerja sebesar 8,75%.

b. Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda

Realisasi Keuangan Total Belanja Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Sumatera Selatan Triwulan I Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp.418.465.787,- dengan realisasi kinerja sebesar 12,97%.

c. Biro Organisasi Setda

Realisasi Keuangan Total Belanja Biro Organisasi Setda Provinsi Sumatera Selatan Triwulan I Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp.129.534.355,- dengan realisasi kinerja sebesar 21,10%.

d. Biro Umum dan Perlengkapan Setda

a) Realisasi Keuangan Total Belanja Biro Umum dan Perlengkapan Setda Provinsi Sumatera Selatan Triwulan I Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp.33.019.131.124,- dengan realisasi kinerja sebesar 23,97%.

b) Secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Biro Umum dan Perlengkapan telah berjalan dengan baik dan lancar, namun pada pelaksanaan masih terdapat beberapa faktor yang menghambat dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Biro Umum dan Perlengkapan, antara lain :

- 1) Kurangnya pemahaman Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur terhadap tugas pokok dan fungsi, kurangnya rasa tanggung jawab terhadap beban kerja yang diberikan atasan, masih rendahnya disiplin dalam bekerja.
- 2) Perubahan peraturan perundang-undangan yang dinamis yang kadangkala payung hukum aturan petunjuk pelaksanaannya belum terbit.
- 3) Adanya struktur organisasi yang kurang optimal dan efektif dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, seperti adanya overlapp tugas dan fungsi antar biro, adanya volume serta beban tugas dan fungsi yang kurang proposional dengan organisasi pelaksanaannya.

e. Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda

Realisasi Keuangan Total Belanja Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Sumatera Selatan Triwulan I Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp.51.417.152.842,- dengan realisasi kinerja sebesar 75,61%.

f. Biro Humas dan Protokol Setda

Realisasi Keuangan Total Belanja Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Sumatera Selatan Triwulan I Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp.3.302.859.327,- dengan realisasi kinerja sebesar 6,68%.

35. Sekretariat DPRD

a) Realisasi Keuangan Total Belanja Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan sampai dengan Triwulan I Tahun Anggaran

2025 sebesar Rp. Rp.54.336.826.907,- dengan realisasi kinerja sebesar 25,16%.

- b) Belum ditemukan hambatan yang berarti dan mempengaruhi sasaran dan prioritas pembangunan daerah Sumatera Selatan Tahun 2025.

36. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

- a) Realisasi Keuangan Total Belanja Bappeda Provinsi Sumatera Selatan s.d. Triwulan I Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp.5.822.716.450,- dengan realisasi kinerja sebesar 16,37%.
- b) Belum ditemukan hambatan yang berarti dan mempengaruhi sasaran dan prioritas pembangunan daerah Sumatera Selatan Tahun 2025.

37. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

- a) Realisasi Keuangan Total Belanja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan sampai dengan Triwulan I Tahun Anggaran 2025 adalah Rp.24.579.837.148,- dengan realisasi kinerja sebesar 5,78%;
- b) Belum ditemukan hambatan yang berarti dan mempengaruhi sasaran dan prioritas pembangunan daerah Sumatera Selatan Tahun 2025.

38. Badan Pendapatan Daerah

- a) Realisasi Keuangan Total Belanja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan sampai dengan Triwulan I Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp.19.486.985.052,- dengan realisasi kinerja sebesar 7,29%.
- b) Belum ditemukan hambatan yang berarti dan mempengaruhi sasaran dan prioritas pembangunan daerah Sumatera Selatan Tahun 2025.

39. Badan Kepegawaian Daerah

- a) Realisasi Keuangan Total Belanja Daerah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan sampai dengan triwulan ini sebesar Rp.3.510.265.673,- dengan realisasi kinerja sebesar 16,01%.
- b) Belum ditemukan hambatan yang berarti dan mempengaruhi sasaran dan prioritas pembangunan daerah Sumatera Selatan Tahun 2025.

40. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah

- a) Realisasi Keuangan Total Belanja BPSDMD Provinsi Sumatera Selatan sampai dengan Triwulan I Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp.5.956.833.788,- dengan realisasi kinerja sebesar 19,07%.
- b) Belum ditemukan hambatan yang berarti dan mempengaruhi sasaran dan prioritas pembangunan daerah Sumatera Selatan Tahun 2025.

41. Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah

- a) Realisasi Keuangan Total Belanja Balitbangda Provinsi Sumatera Selatan sampai dengan Triwulan I Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp.2.434.129.113,- dengan realisasi kinerja sebesar 14,34%.
- b) Belum ditemukan hambatan yang berarti dan mempengaruhi sasaran dan prioritas pembangunan daerah Sumatera Selatan Tahun 2025.

42. Badan Penghubung

- a) Realisasi Keuangan Total Belanja Badan Penghubung Provinsi Sumatera Selatan sampai dengan Triwulan I Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp.1.519.168.931,- dengan realisasi kinerja sebesar 20,00%.
- b) Belum ditemukan hambatan yang berarti dan mempengaruhi sasaran dan prioritas pembangunan daerah Sumatera Selatan Tahun 2025.

43. Inspektorat

- a) Realisasi Keuangan Total Belanja Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan sampai dengan Triwulan I Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp.7.656.671.641,- dengan realisasi kinerja sebesar 22,43%.
- b) Ada beberapa kendala yaitu:
 - 1) Penetapan target pada perencanaan kinerja tahunan belum sepenuhnya mempertimbangkan capaian pada tahun sebelumnya.
 - 2) Indikator yang ada di Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan bukan hanya kinerja Inspektorat saja tetapi dipengaruhi juga oleh kinerja dari pihak lain/OPD terkait dan dinilai oleh eksternal, sehingga dibutuhkan komunikasi dan koordinasi yang baik disamping kompetensi dan kecakapan.
 - 3) Beberapa Indikator Kinerja yang belum bisa diperoleh dikarenakan sebagian besar realisasi dari Indikator Kinerja didapat dari pihak eksternal yang akan dirilis pada triwulan IV.

44. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

- a) Realisasi keuangan total belanja sampai dengan Triwulan I Tahun Anggaran 2025 Pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik provinsi Sumatera selatan sebesar Rp.2.389.143.225,-, dengan realisasi kinerja sebesar 10,00%;
- b) Belum ditemukan hambatan yang berarti dan mempengaruhi sasaran dan prioritas pembangunan daerah Sumatera Selatan Tahun 2025.

Kinerja Penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Kinerja Penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 seperti terlihat pada tabel 2.2 sebagai berikut :

Tabel 2.2
Kinerja Penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

No	Urusan	Capaian SPM
1	Pendidikan	81,61
2	Kesehatan	99,26
3	Pekerjaan Umum	100,00
4	Perumahan Rakyat	100,00
5	Trantibumlinmas	94,69
6	Sosial	100,00
Sumatera Selatan		95,93

Sumber : Aplikasi Pelaporan SPM (spm.bangda.kemendagri.go.id)